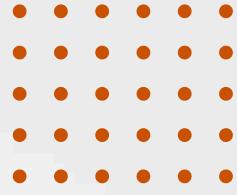




Pengadilan Agama Sungai Raya
Kelas IB



2025

LAPORAN KEUANGAN

Semester I

Bagian Anggaran
04 - Badan Peradilan Agama



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungai Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Peradilan Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Sungai Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.6 Belanja Bantuan Sosial	
B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-PoS Neraca	14
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	21
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	26
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	28
VI.	Lampiran dan Daftar	

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024
- 3 Perbandingan PNBP Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025
- 5 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024
- 6 Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024
- 7 Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024
- 8 Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024
- 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024
- 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024
- 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024
- 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024
- 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024
- 15 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2025 dan 2024
- 16 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024
- 17 Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024
- 18 Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2025 dan 2024
- 20 Rincian Tanah Semester I TA 2025
- 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025
- 22 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2025
- 23 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
- 24 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
- 25 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
- 26 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2025 dan 2024
- 27 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024
- 28 Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024
- 29 Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 30 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2025 dan 2024
- 31 Rincian Tanah Semester I TA 2025
- 32 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025
- 33 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2025
- 34 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
- 35 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
- 36 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
- 37 Rincian Hibah Yang Belum Disahkan
- 38 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut
- 39 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut
- 40 Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :
- 41 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut
- 42 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024
- 43 Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024
- 44 Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024
- 45 Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024
- 46 Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024
- 47 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024
- 48 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2025 dan 2024

- 49 Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024
- 50 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024
- 51 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2025 dan 2024
- 52 Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2025 dan 2024
- 53 Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2025 dan 2024
- 54 Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024
- 55 Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2025 dan 2024
- 56 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
- 57 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025
- 58 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025
- 59 Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025
- 60 Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025
- 61 Rincian Transfer Keluar Tahun 2025
- 62 Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

DAFTAR GRAFIK

1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp52.981.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp52.981.000 atau mencapai 53,39 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp99.229.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp36.030.000 atau mencapai 42,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp84.800.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025 . Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.748.860 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp27.748.860; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp26.055.000 dan Rp1.693.860

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp52.981.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp37.103.980 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp15.877.020, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp15.877.020.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp832.000, ditambah Surplus-LO sebesar Rp15.877.020 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar -15.015.160 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp1.693.860

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Laporan Realisasi Anggaran

LAMPIRAN II Neraca

LAMPIRAN III Laporan Operasional

LAMPIRAN IV Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024**

URAIAN	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	99.229.000	52.981.000	53,39	37.188.000
JUMLAH PENDAPATAN		99.229.000	52.981.000	53,39	37.188.000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	84.800.000	36.030.000	42,49	63.800.000
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		84.800.000	36.030.000	42,49	63.800.000

NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	26.055.000	-
Persediaan	C.3	1.693.860	832.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.4	-	-
Jumlah Aset Lancar		27.748.860	832.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.16	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.19	-	-
Tanah Belum Diregister	C.20	-	-
Peralatan dan Mesin	C.21	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.22	-	-
Gedung dan Bangunan	C.23	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.24	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.26	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.27	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.28	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.30	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.30	-	-
Aset Tak Berwujud	C.31	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.32	-	-
Aset Lain-lain	C.33	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.34	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		27.748.860	832.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	26.055.000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.37	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.38	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.39	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.40	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.41	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.42	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26.055.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		26.055.000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.43	1.693.860	832.000
JUMLAH EKUTAS		1.693.860	832.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.748.860	832.000

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	52.981.000	37.188.000
Jumlah Pendapatan		52.981.000	37.188.000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	1.993.980	3.546.582
Beban Barang dan Jasa	D.4	17.900.000	17.500.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.210.000	43.200.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		37.103.980	64.246.582
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		15.877.020	(27.058.582)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		15.877.020	(27.058.582)
Pos Luar Biasa	D.14		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		15.877.020	(27.058.582)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	832.000	446.582
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	15.877.020	(27.058.582)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(15.015.160)	29.108.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		861.860	2.049.418
EKUITAS AKHIR	E.6	1.693.860	2.496.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum, Profil dan Kebijakan Teknis

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

2. Profil dan Kebijakan Teknis

Visi Pengadilan Agama Sungai Raya merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2025 s.d 2029 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tahun 2025 sampai dengan 2029 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Sungai Raya. Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Sungai Raya yang Agung".

Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah Misi Pengadilan Agama Sungai Raya adalah :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan.
2. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuensi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sungai Raya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas, profesionalisme dan karir pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya di bidang tugasnya masing-masing.
- b. Meningkatnya minat dan kemauan pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menambah ilmu pengetahuan.
- c. Meningkatnya etos kerja pegawai Pengadilan Agama Sungai Raya sehingga berorientasi kepada hasil (indikator persentase peningkatan etos kerja).
- d. Meningkatnya keseragaman pola administrasi dan manajemen peradilan di semua lingkungan peradilan.
- e. Meningkatnya akurasi data dan statistik, mulai dari penyusunan, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data, termasuk pemanfaatan teknologi dengan penerapan aplikasi yang lebih canggih.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungai Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sungai Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodeifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset Lancar

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	<p>1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.</p> <p>2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</p>	<p>1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.</p> <p>2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</p>	100%
--------------	---	---	------

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam penggerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	99.229.000	99.229.000
Jumlah Pendapatan	99.229.000	99.229.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	84.800.000	84.800.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	84.800.000	84.800.000

*Realisasi Pendapatan
Rp52.981.000*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp52.981.000 atau mencapai 53,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp99.229.000. Pendapatan Pengadilan Agama Sungai Raya terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp52.981.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	99.229.000	52.981.000	53,39
Jumlah	99.229.000	52.981.000	53,39

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 42,47 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	52.981.000	37.188.000	42,47
Jumlah	52.981.000	37.188.000	42,47

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp52.981.000*

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp52.981.000 dan Rp37.188.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 42,47 dari TA 2024 akibat meningkatnya jumlah perkara yang diterima. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	52.981.000	37.188.000	42,47
Jumlah	52.981.000	37.188.000	42,47

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.550.000	530.000	192,45

Pendapatan Ongkos Perkara	18.870.000	14.760.000	27,85
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	32.561.000	21.898.000	48,69
Jumlah	52.981.000	37.188.000	42,47

Realisasi Belanja
Rp36.030.000

B.2 Belanja

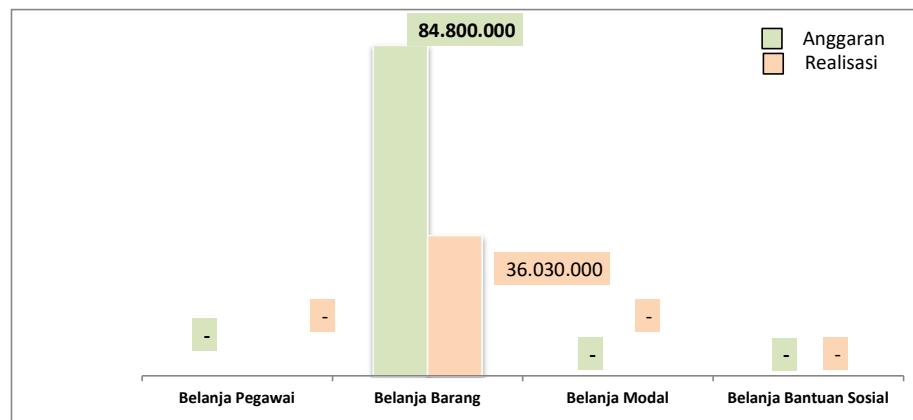
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp36.030.000 atau 42,49 % dari anggaran belanja sebesar Rp.84.800.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	84.800.000	36.030.000	42,49
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	84.800.000	36.030.000	42,49

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 43,53% yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	36.030.000	63.800.000	(43,53)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	36.030.000	63.800.000	(43,53)

Realisasi Belanja
Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja
Barang Rp36.030.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.030.000 dan Rp63.800.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 43,53% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh yang diakibatkan adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	920.000	3.100.000	(70,32)
Belanja Jasa	17.900.000	17.500.000	2,29
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.210.000	43.200.000	(60,16)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	36.030.000	63.800.000	(43,53)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	36.030.000	63.800.000	(43,53)

Realisasi Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya belanja modal tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan serta belanja pertambahan nilai gedung dan bangunan di mana tahun ini tidak ada realisasi untuk belanja tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal jalan irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-

Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak adanya belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial tahun ini tidak ada realisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, berupa :
 - a. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan, berupa pemenuhan belanja jasa layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat.
 - b. Perkara Hukum Perseorangan, berupa pemenuhan belanja barang dalam rangka pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu dan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

Secara rinci output atas Program Dukungan Manajemen dapat kami sampaikan dalam tabel di bawah ini :

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian
1	QBA.003	Posbakum	35.000.000	17.500.000	50,00%	350	175	50,00%
2	QCA.001	Prodeo	10.300.000	3.170.000	30,78%	20	7	35,00%
3	QCA.002	Sidang Di Luar Gedung	39.500.000	15.360.000	38,89%	75	63	84,00%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Rekening VA Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,- karena belum mengajukan Uang Persediaan

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp26.055.000*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp26.055.000 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	26.055.000	-
Jumlah	26.055.000	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Dana Pihak Ketiga berupa biaya perkara yang ditampung di dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).

*Persediaan
Rp1.693.860*

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.693.860 dan Rp832.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	1.693.860	832.000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	1.693.860	832.000

*Persediaan yang Belum
Diregister Rp0*

C.4 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0*

C.5 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.6 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.7 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.9 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah			-

Tanah Belum Diregister

Rp0

C.10 Tanah Belum DIREGISTER

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum DIREGISTER yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin

Rp0

C.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Peralatan dan Mesin

Belum DIREGISTER Rp0

C.12 Peralatan dan Mesin Belum DIREGISTER

Nilai Peralatan dan Mesin Belum DIREGISTER per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan

Rp0

C.13 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Gedung dan Bangunan

Belum DIREGISTER Rp0

C.14 Gedung dan Bangunan Belum DIREGISTER

Saldo Gedung dan Bangunan Belum DIREGISTER per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum DIREGISTER pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Jalan, Irigasi dan

Jaringan Rp0

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Jalan, Irigasi dan

Jaringan Belum DIREGISTER Rp0

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum DIREGISTER

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum DIREGISTER per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum DIREGISTER pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.18 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp0

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
-		-
Jumlah		-

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Sungai Raya berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.23 Aset Tak Berwujud Dalam Penggeraan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Penggeraan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Penggeraan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses penggeraan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Penggeraan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

C.24 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Akhir	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

C.25 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp26.055.000

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp26.055.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Dana Pihak Ketiga	26.055.000	-
Total	26.055.000	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Adanya Dana Pihak Ketiga berupa uang perkara yang ditampung di dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp. 26.055.000,-

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.28 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.29 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
Jumlah	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.30 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.31 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.32 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Belum mengajukan Uang Persediaan ke KPPN Pontianak

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.33 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Ekuitas Rp1.693.860

C.34 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.693.860. dan Rp832.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp52.981.000

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp52.981.000 dan Rp37.188.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 42,47. Hal tersebut disebabkan oleh karena bertambahnya realisasi PNBP pada akun 425233 (Pendapatan Ongkos Perkara) dan akun 425239 (Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya). Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah	1.550.000	530.000,00	192,45
Pendapatan Ongkos Perkara	18.870.000	14.760.000,00	27,85
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	32.561.000	21.898.000,00	48,69
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	52.981.000,00	37.188.000,00	42,47

Beban Pegawai Rp0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena tidak adanya realisasi belanja tersebut. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Persediaan
Rp1.993.980*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.993.980 dan Rp3.546.582

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat komsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 43,78 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena adanya transfer masuk blangko Akta Cerai dari PTA Pontianak. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	1.993.980	3.546.582	(43,78)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1.993.980,00	3.546.582	(43,78)

*Beban Barang dan Jasa
Rp17.900.000*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.900.000 dan Rp17.500.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena berubahnya pola pelaksanaan anggaran perkara prodeo dalam pencairan biaya transport yang dibayarkan secara at cost sehingga berpengaruh terhadap serapan anggaran. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Bahan	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	17.500.000	17.500.000	-
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	400.000	-	-
Jumlah	17.900.000	17.500.000,00	2,29

*Beban Pemeliharaan
Rp0*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena tidak adanya realisasi belanja tersebut Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Perjalanan Dinas
Rp17.210.000*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp17.210.000 dan Rp43.200.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 60,16 persen disebabkan oleh Secara keseluruhan belanja perjalanan dinas pada periode Semester I TA 2025 mengalami penurunan akibat adanya efisiensi anggaran.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.210.000	43.200.000	(60,16)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kot	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	17.210.000,00	43.200.000	(60,16)

*Beban Barang Untuk
Diberikan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena tidak adanya realisasi belanja tersebut. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh karena tidak adanya realisasi belanja tersebut. Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0*

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0*

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasinal Lainnya Rp0*

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNBP	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.832.000,00 dan Rp.446.582,00

Ekuitas Awal

Rp832.000,00

Defisit LO

Rp.15.877.020,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.15.877.020,00 dan Rp.-27.058.582,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-15.015.160 dan Rp.29.108.000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	36.030.000
Diterima dari Entitas Lain	(52.981.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1.935.840
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	(15.015.160)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 36.030.000, sedangkan DDEL sebesar Rp 52.981.000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1.935.840 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Blangko Akta Cerai	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	1.935.840
Jumlah		1.935.840

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BABUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

*Ekuitas Akhir
Rp1.693.860*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.693.860,00 dan Rp.2.496.000,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2025 pada Pengadilan Agama Sungai Raya yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi :

1. Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya adalah :
 - a. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 653244019641000 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964 telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan Nomor : S-762/ PB.3/2021 Tanggal 21-04-2021, yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,00.
 - b. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Pontianak, Nomor Rekening 651544034251000 a.n. BPG 042 PA SUNGAI RAYA 403425 telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Menteri Keuangan Nomor : S-665/ PB.3/ 2021 Tanggal 05-04-2021, yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,00.
 - c. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kubu Raya, Nomor Rekening 2024020242 a.n. RPL 042 PDT PA SEI.RAYA UTK PERKARA telah mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN Pontianak Nomor S-1912/KPN.1701/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang digunakan sebagai penampung biaya perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 26,055,000,00.

- d. Sedangkan Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sungai Raya yang telah ditutup tidak ada.
- 2. DIPA BA 04 sebesar Rp. 84.800.000,- s.d. periode 30 Juni 2025 dilakukan revisi dalam hal pagu tetap sebanyak 4 (empat) kali yang meliputi revisi penyesuaian Halaman III DIPA.
- 3. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ketiga
 - a. Biaya perkara merupakan biaya yang dibayarkan para pihak atau masyarakat pencari keadilan pada saat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sungai Raya termasuk biaya-biaya lain selama jalannya proses penyelesaian perkaranya tersebut. Adapun saldo akhir biaya perkara per 30 Juni 2025 berdasarkan L1PA.7a sebesar Rp. 52.333.500,- yang terdiri dari Rp. 26.055.000,- (Kas di Bank) dan Rp. 26.278.500,- (Kas Tunai).
 - b. Biaya eksekusi merupakan biaya yang digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun saldo akhir per 30 Juni 2025 berdasarkan L1PA.7b sebesar Rp. 0,- (Kas Tunai).
 - c. Biaya konsinyasi merupakan uang yang dititipkan kepada Pengadilan Agama Sungai Raya oleh pihak/masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur) karena pihak/masyarakat yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima/belum mengambil uang titipan tersebut. Adapun saldo akhir per 30 Juni 2025 berdasarkan L1PA.7c sebesar Rp. 0, -

LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN A.3
TABEL DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04

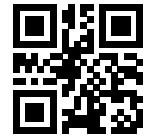
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA 403425

Tgl Data : 24/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA 403425

Tgl Data : 24/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025					2024				
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	84,800,000	36,030,000	(48,770,000)	42.49	109,800,000	63,800,000	(46,000,000)	58.11		
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0		

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 24 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



GALIH TRIATMOJO, S.E., M.M.

NIP 198102142006041003

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (403425) PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Tgl Data : 24/07/25 7:09 AM

Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	26,055,000	0	26,055,000	0.00
Persediaan	1,693,860	832,000	861,860	103.59
JUMLAH ASET LANCAR	27,748,860	832,000	26,916,860	3,235.20
JUMLAH ASET	27,748,860	832,000	26,916,860	3,235.20
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	26,055,000	0	26,055,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,055,000	0	26,055,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	26,055,000	0	26,055,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,693,860	832,000	861,860	103.59
JUMLAH EKUITAS	1,693,860	832,000	861,860	103.59
JUMLAH EKUITAS	1,693,860	832,000	861,860	103.59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27,748,860	832,000	26,916,860	3,235.20

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 24 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



GALIH TRIATMOJO, S.E., M.M.

NIP 198102142006041003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (403425) PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Tgl Data : 24/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	52,981,000	37,188,000	15,793,000	42.468
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	52,981,000	37,188,000	15,793,000	42.468
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	52,981,000	37,188,000	15,793,000	42.468
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	0
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Persediaan	1,993,980	3,546,582	(1,552,602)	(43.777)
Beban Barang dan Jasa	17,900,000	17,500,000	400,000	2.286
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	17,210,000	43,200,000	(25,990,000)	(60.162)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT
SATUAN KERJA : (403425) PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Tgl Data : 24/07/25 7:09 AM
Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN	37,103,980	64,246,582	(27,142,602)	(42.248)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	15,877,020	(27,058,582)	42,935,602	(158.676)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	15,877,020	(27,058,582)	42,935,602	(158.676)
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	15,877,020	(27,058,582)	42,935,602	(158.676)

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 24 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



GALIH TRIATMOJO, S.E., M.M.
NIP 198102142006041003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (403425) PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Tgl Data : 24/07/25 12:26 PM

Tgl Cetak : 24/07/25 2:17 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	832,000	446,582	385,418	86.3
SURPLUS/DEFISIT-LO	15,877,020	(27,058,582)	42,935,602	(158.68)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(15,015,160)	29,108,000	(44,123,160)	(151.58)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	861,860	2,049,418	(1,187,558)	(57.95)
EKUITAS AKHIR	1,693,860	2,496,000	(802,140)	(32.14)

Keterangan :

FINAL

KUBU RAYA, 24 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



GALIH TRIATMOJO, S.E., M.M.
NIP 198102142006041003

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
BULAN : JUNI 2025**

LI-PA.7.A

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	56.205.500	
2	Penerimaan	45.453.000	
3	Biaya Pemberkasan / ATK		9.000.000
4	Biaya Panggilan		17.720.000
5	Biaya Penerjemah		0
6	Biaya Pemberitahuan		6.625.000
7	Biaya Sita		0
8	Biaya Pemeriksaan Setempat		0
9	Biaya Sumpah		0
10	Kirim Biaya Perkara		0
11	Materai		1.210.000
12	PNBP		
	- Biaya Pendaftaran		2.700.000
	- Biaya Redaksi		1.210.000
	- Biaya Penyampaian Relaas		2.460.000
13	Pengembalian Sisa Panjar		8.400.000
14	Pelaksanaan Eksekusi		0
15	Saldo Akhir Juni 2025		52.333.500
Jumlah		101.658.500	101.658.500
Saldo Akhir			52.333.500
Saldo Bank (e-statement)			26.055.000
Saldo Tunai			26.278.500
Selisih			0

Keterangan Selisih :



Sungai Raya, 30 Juni 2025

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha, SH
NIP. 198305102006041002

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA EKSEKUSI
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
BULAN : JUNI 2025**

LI-PA 7.B

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	Rp	- Rp -
2	Penerimaan	Rp	- Rp -
3	Biaya Pendaftaran	Rp	- Rp -
4	Biaya ATK/Proses	Rp	- Rp -
5	Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp	- Rp -
6	PNBP	Rp	- Rp -
	a. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp	- Rp -
	b. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp	- Rp -
7	Pencabutan Sita Eksekusi	Rp	- Rp -
8	Leges	Rp	- Rp -
9	Materai	Rp	- Rp -
10	Biaya Jurusita Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp	- Rp -
11	Saksi	Rp	- Rp -
12	Transport Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp	- Rp -
13	Pengembalian Sisa Panjar	Rp	- Rp -
Jumlah		Rp	- Rp -
Saldo Akhir		Rp	-
Saldo Bank		Rp	-
Saldo Kas Tunai		Rp	-
JUMLAH		Rp	-
Sisa bulan ini		Rp	-

Sungai Raya, 30 Juni 2025

Mengetahui:

Ketua,



Erpan, S.H., M.H.

NIP. 197911152005021001

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha,SH

NIP. 198305102006041002

**LAPORAN KEUANGAN PERKARA KONSIGNASI
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
BULAN : JUNI 2025**

LI-PA 7.C

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
		(RP)	(RP)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	-	-
2	Penerimaan (Uang Konsignasi dan Panjar Konsignasi)	-	-
3	Biaya Pelaksanaan Penawaran	-	-
4	Biaya Pendaftaran	-	-
5	Biaya Proses/ATK	-	-
6	Redaksi	-	-
7	Meterai	-	-
8	Leges	-	-
9	Pengambilan Uang Kosignasi	-	-
	Jumlah	-	-
	Saldo Akhir	-	-
	Saldo Bank	-	-
	Saldo Kas Tunai	-	-

Sungai Raya, 30 Juni 2025

Mengetahui:

Ketua,



Erpan, S.H., M.H

NIP. 197911152005021001

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha,SH

NIP. 198305102006041002



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 403425
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	84,800,000	84,800,000	0
2	Belanja	36,030,000	36,030,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	99,229,000	99,229,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	52,981,000	52,981,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-25

